

Dari Kepatuhan Ke Keunggulan: Manajemen Rantai Pasok Halal Sebagai Strategi Transformatif Pembangunan Ekonomi Daerah Di Indonesia

¹Awal Awal, ²Sri Rahmi Sahar, ³Indi Arianti, ⁴Syaripuddin Syaripuddin

^{1,2,3,4}Institut Agama Islam Al-Amanah Jeneponto, Indonesia

Email: 1awal40998@gmail.com, 2srirahmisahar21@gmail.com, 3indiarianti88@gmail.com, 4syaripuddinsalama4@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan menganalisis dan mensintesis peran manajemen rantai pasok halal (Halal Supply Chain Management/HSCM) sebagai strategi transformatif pembangunan ekonomi daerah di Indonesia dalam perspektif ekonomi syariah dan pembangunan berkelanjutan. Penelitian menggunakan pendekatan systematic literature review (SLR) berbasis protokol PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), menganalisis 45 artikel terpilih dari 312 dokumen awal yang diperoleh dari basis data Scopus, Web of Science, Google Scholar, dan SINTA dalam rentang 2015–2025. Analisis tematik mengidentifikasi lima tema utama: (1) fondasi konseptual HSCM berbasis maqashid syariah; (2) mekanisme pengaruh HSCM terhadap enam dimensi pembangunan ekonomi daerah; (3) tantangan struktural implementasi; (4) peran digitalisasi dan blockchain dalam HSCM; serta (5) integrasi HSCM dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Hasil sintesis menegaskan bahwa HSCM berpengaruh positif terhadap daya saing produk lokal, pertumbuhan UMKM, perluasan akses pasar domestik dan ekspor, peningkatan investasi daerah, penyerapan tenaga kerja, serta penguatan kesejahteraan masyarakat. Novelty penelitian ini terletak pada konstruksi kerangka integrasi HSCM dengan pembangunan ekonomi syariah daerah mencakup digitalisasi halal ecosystem, green halal logistics, dan pendekatan ESG-syariah yang belum dikaji secara komprehensif dalam literatur sebelumnya. Temuan ini memiliki implikasi signifikan bagi pemerintah daerah, pelaku UMKM, dan pemangku kebijakan dalam merancang ekosistem halal regional yang kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Manajemen Rantai Pasok Halal; Pembangunan Ekonomi Daerah; Systematic Literature Review; Ekonomi Syariah; Digitalisasi Halal; Green Halal Logistics; SDGs; UMKM Halal

Abstract

Purpose: This study analyzes and synthesizes the role of Halal Supply Chain Management (HSCM) as a transformative strategy for regional economic development in Indonesia within the frameworks of Islamic economics and sustainable development. Design/Methodology/Approach: A systematic literature review (SLR) using the PRISMA 2020 protocol was employed, analyzing 45 selected articles from 312 initial documents sourced from Scopus, Web of Science, Google Scholar, and SINTA databases (2015–2025). Thematic analysis identified five major themes: (1) conceptual foundations of HSCM grounded in maqashid al-shariah; (2) mechanisms of HSCM's influence on six dimensions of regional economic development; (3) structural implementation challenges; (4) digitalization and blockchain in HSCM; and (5) HSCM integration with the Sustainable Development Goals (SDGs). Findings: HSCM positively influences local product competitiveness, SME growth, domestic and export market access, regional investment, employment absorption, and community welfare. Originality/Value: The novelty lies in the construction of an integrative framework connecting HSCM with regional Islamic economic development encompassing halal digital ecosystems, green halal logistics, and ESG-shariah alignment which has not been comprehensively addressed in prior literature. The findings carry significant implications for regional governments, SME practitioners, and policymakers in designing competitive, inclusive, and sustainable regional halal ecosystems.

Keywords: Halal Supply Chain Management; Regional Economic Development; Systematic Literature Review; Islamic Economics; Halal Digitalization; Green Halal Logistics; SDGs; Halal SMEs

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi halal global dalam satu dekade terakhir mencatat akselerasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berdasarkan *State of the Global Islamic Economy Report 2023/2024* yang diterbitkan DinarStandard, nilai pengeluaran konsumen Muslim global pada sektor halal mencapai USD 2,29 triliun pada tahun 2022 dan diproyeksikan melampaui USD 3,1 triliun pada tahun 2025 (DinarStandard, 2023). Halal yang dahulu identik secara sempit dengan produk makanan dan minuman kini telah bertransformasi menjadi standar kualitas lintas sektor mencakup farmasi, kosmetik, fesyen muslim, pariwisata ramah muslim, logistik, keuangan syariah, hingga ekosistem digital halal. Transformasi ini menandai pergeseran paradigma fundamental: halal bukan lagi sekadar kewajiban religius, melainkan standar kualitas global, preferensi konsumen universal, dan kerangka nilai bisnis yang melampaui batas demografis dan geografis (DinarStandard, 2023; Ab Talib et al., 2015).

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia mencapai 237,56 juta jiwa atau 86,9% dari total populasi (BPS, 2021) memiliki posisi strategis yang sangat potensial untuk menjadi episentrum produsen halal dunia. Keunggulan demografis ini didukung oleh kekayaan sumber daya alam pertanian dan perikanan, keragaman produk lokal berbasis kearifan daerah, serta ekosistem UMKM yang mencapai 64,2 juta unit dan berkontribusi 60,5% terhadap PDB nasional (Kementerian Koperasi dan UKM, 2022). Namun paradoks yang memprihatinkan justru terjadi: Indonesia masih berada di posisi konsumen neto produk halal pada beberapa kategori strategis, sementara Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Turki secara konsisten melampaui Indonesia dalam *Global Islamic Economy Indicator* (DinarStandard, 2023). Kegagalan mengoptimalkan potensi masif ini berakar pada lemahnya sistem manajemen rantai pasok halal yang terintegrasi (Hasan & Hilalludin, 2025).

Manajemen rantai pasok halal (*Halal Supply Chain Management/HSCM*) adalah pendekatan strategis yang mengelola aliran barang, jasa, informasi, dan keuangan dari hulu ke hilir mulai dari pemasok bahan baku hingga konsumen akhir dengan menjamin integritas halal pada setiap tahapan rantai nilai (Tieman, 2011; Rohaeni & Sutawijaya, 2020). Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, HSCM memiliki relevansi ganda: sebagai instrumen kepatuhan syariah yang memenuhi tuntutan pasar halal global, sekaligus sebagai katalis pembangunan yang mengakselerasi nilai tambah produk lokal, memperkuat UMKM, menarik investasi, menciptakan

lapangan kerja, dan memperluas akses pasar ekspor ke 57 negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI).

Kajian akademik mengenai HSCM telah mengalami perkembangan signifikan sejak karya Tieman (2011) yang meletakkan kerangka konseptual dasarnya. Namun, analisis mendalam terhadap literatur yang ada mengungkapkan tiga kesenjangan kritis. Pertama, sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada perilaku konsumen halal, manajemen operasional korporasi besar, atau aspek teknis sertifikasi produk secara parsial tanpa mengintegrasikannya ke dalam kerangka pembangunan ekonomi daerah yang holistik (Ab Talib et al., 2015; Rasi et al., 2016; Ngah et al., 2021). Kedua, aspek digitalisasi ekosistem halal termasuk blockchain traceability, Internet of Things (IoT) dalam cold chain, dan platform e-halal belum dikaji secara sistematis kaitannya dengan pembangunan ekonomi daerah di Indonesia (Jia et al., 2022). Ketiga, dimensi keberlanjutan HSCM terutama integrasi dengan Sustainable Development Goals (SDGs), kerangka Environmental, Social, and Governance (ESG), dan green halal logistics masih sangat terbatas dieksplorasi dalam konteks ekonomi syariah regional (Al-Mubarak et al., 2024). Kesenjangan literatur tiga lapis inilah yang menjadi urgensi akademik dan justifikasi ilmiah penelitian ini.

Novelty penelitian ini terletak pada konstruksi kerangka integrasi yang menghubungkan HSCM dengan pembangunan ekonomi syariah daerah secara komprehensif mengintegrasikan perspektif maqashid syariah, penguatan ekosistem UMKM halal daerah, digitalisasi rantai pasok, green halal logistics, dan kerangka SDGs-ESG dalam satu analisis sistematis yang belum ada presedennya dalam literatur nasional maupun internasional. Penelitian ini juga menghadirkan analisis komparatif ekosistem HSCM Indonesia, Malaysia, dan Uni Emirat Arab untuk mengidentifikasi peluang strategis percepatan pembangunan halal nasional (Said & Hilalludin, 2025).

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini bertujuan: (1) mensintesis bukti empiris mengenai mekanisme pengaruh HSCM terhadap enam dimensi pembangunan ekonomi daerah; (2) mengidentifikasi tantangan struktural implementasi HSCM di daerah; (3) menganalisis peran digitalisasi dan teknologi blockchain dalam memperkuat HSCM; (4) membangun kerangka integrasi HSCM dengan SDGs dan ESG dalam perspektif ekonomi syariah; serta (5) merumuskan rekomendasi strategi kebijakan operasional bagi pemerintah daerah dalam membangun ekosistem halal regional yang kompetitif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *Systematic Literature Review* (SLR) untuk menganalisis hubungan *Halal Supply Chain Management* (HSCM) terhadap pembangunan ekonomi daerah. Metode SLR dipilih karena mampu menyajikan sintesis literatur secara sistematis, transparan, dan berbasis bukti ilmiah. Proses penelitian mengacu pada pedoman PRISMA 2020 sehingga tahapan pencarian, seleksi, hingga analisis literatur dapat dilakukan secara terstruktur dan dapat direplikasi. Pencarian literatur dilakukan pada lima basis data utama, yaitu Scopus, Web of Science, Google Scholar, SINTA, dan Garuda. Kata kunci yang digunakan mencakup tema HSCM, logistik halal, pembangunan ekonomi syariah, sertifikasi halal, blockchain halal, hingga UMKM halal dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Artikel yang dipilih dibatasi pada publikasi tahun 2015–2025 serta harus memiliki metodologi yang jelas dan dapat diakses secara penuh.

Tahap identifikasi menghasilkan 312 dokumen, kemudian setelah penghapusan duplikat tersisa 247 artikel. Proses skrining judul dan abstrak mengurangi jumlah menjadi 100 artikel, lalu tahap penilaian kelayakan teks penuh menghasilkan 62 artikel. Setelah dilakukan penilaian kualitas menggunakan *Critical Appraisal Skills Programme* (CASP), diperoleh 45 artikel berkualitas tinggi yang digunakan dalam analisis akhir. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis tematik berdasarkan pendekatan Braun dan Clarke (2006). Proses ini dilakukan melalui *open coding* dan *axial coding* untuk menemukan pola hubungan antar-konsep. Hasil sintesis menunjukkan lima tema utama, yaitu: (1) fondasi konseptual HSCM berbasis maqashid syariah, (2) pengaruh HSCM terhadap pembangunan ekonomi daerah, (3) tantangan implementasi, (4) digitalisasi dan blockchain dalam ekosistem halal, serta (5) integrasi HSCM dengan SDGs, ESG, dan *green halal logistics* (Sugari & Hilalludin, 2025).

Berdasarkan hasil sintesis tersebut, penelitian ini membangun kerangka konseptual yang menempatkan HSCM sebagai instrumen strategis pembangunan ekonomi syariah daerah. HSCM dinilai mampu meningkatkan nilai tambah produk lokal, memperluas akses pasar halal, memperkuat UMKM, menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengaruh tersebut diperkuat oleh regulasi halal, digitalisasi ekosistem halal, dan integrasi prinsip keberlanjutan berbasis maqashid syariah dan *falah*.

Tabel 1. Pemetaan Literatur Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Fokus Penelitian	Temuan Utama
1	Tieman (2011)	Halal supply chain	Integritas halal harus dijaga dari hulu ke hilir
2	Ab Talib et al. (2015)	Sertifikasi halal & logistik	Sertifikasi halal meningkatkan kinerja logistik
3	Rasi et al. (2016)	Praktik HSCM UKM Malaysia	Integritas halal berlaku di seluruh rantai pasok
4	Rohaeni & Sutawijaya (2020)	Model HSCM Indonesia	Diperlukan dukungan kelembagaan dan infrastruktur
5	Aslikhah & Faridah (2021)	Strategi HSCM global	HSCM meningkatkan daya saing produk halal
6	Aziz et al. (2021)	HSCM UMKM	HSCM memperluas akses pasar UMKM
7	Rachim & Santoso (2021)	HSCM & kesejahteraan	HSCM mendukung pemerataan ekonomi
8	Ali et al. (2021)	HSCM industri global	Standar halal meningkatkan traceability
9	Ngah et al. (2021)	Adopsi logistik halal	Regulasi dan komitmen manajemen berpengaruh besar
10	Hasanah & Ridwan (2022)	Sertifikasi halal UMKM	Sertifikasi meningkatkan omzet UMKM
11	Jia et al. (2022)	Blockchain halal	Blockchain memperkuat transparansi halal
12	Paramata (2023)	HSCM perspektif Islam	HSCM menjadi instrumen ekonomi syariah
13	Maniam (2024)	Ekosistem halal	Ekosistem halal meningkatkan investasi
14	Al-Mubarak et al. (2024)	ESG & HSCM	Integrasi ESG mendukung SDGs

Sumber: Diolah dari berbagai literatur (2011–2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks dan Peluang HSCM di Indonesia: Analisis Komparatif

Perkembangan HSCM di Indonesia menunjukkan tren yang semakin dinamis, didorong oleh tiga akselerator utama: meningkatnya kesadaran konsumsi halal, implementasi regulasi JPH yang makin ketat, dan program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) yang menargetkan 1 juta UMKM bersertifikat halal per tahun (BPJPH, 2023). Pada tahun 2022, jumlah produk bersertifikat halal BPJPH melampaui 4,6 juta produk meningkat drastis dari 500 ribu produk pada 2019 (Kementerian Agama RI, 2023). Namun capaian ini belum mampu mengangkat Indonesia ke posisi yang sepadan dengan potensinya (Hilalludin, 2025).

Analisis komparatif dengan Malaysia dan Uni Emirat Arab (UAE) mengungkapkan kesenjangan strategis yang signifikan, sekaligus memberikan peta jalan konkret untuk akselerasi ekosistem HSCM nasional. Malaysia berhasil membangun infrastruktur halal kelas dunia melalui Halal Industry Development Corporation (HDC) sejak 2006, termasuk 42 halal industrial park, Port Klang sebagai halal logistics hub internasional, dan sistem blockchain traceability untuk produk ekspor menghasilkan nilai ekspor lebih dari USD 14,8 miliar pada tahun 2022 (HDC, 2023). UAE, melalui Dubai World Central Halal Logistics Zone yang mengintegrasikan AI dan blockchain dalam sistem sertifikasi nasional, memosisikan diri sebagai hub halal premium kawasan Timur Tengah dan Afrika (ESMA, 2023). Tabel 3 menyajikan analisis komparatif ekosistem HSCM ketiga negara secara sistematis.

Tabel 3. Analisis Komparatif Ekosistem HSCM: Indonesia, Malaysia, dan UAE

Aspek	Indonesia	Malaysia	Uni Emirat Arab (UAE)
Regulasi Halal	UU No. 33/2014 tentang JPH; PP No. 39/2021; wajib sertifikasi mulai 2024 (makanan & minuman)	Halal Industry Development Corp (HDC) sejak 2006; standar MS1500:2019; regulasi terpadu	Emirates Authority for Standardization (ESMA); standar UAE.S 2055; one-stop certification
Infrastruktur Logistik	Terbatas di luar Jawa; cold chain halal belum merata; disparitas antar wilayah signifikan	Halal Hub Port Klang terintegrasi; 42 halal industrial parks (2023); cold chain nasional	Dubai World Central Halal Logistics Zone; free zone halal eksklusif; infrastruktur kelas dunia
Digitalisasi HSCM	Digitalisasi UMKM 2021–2024; adopsi blockchain masih terbatas korporasi besar	MyHalal e-platform terintegrasi; blockchain traceability untuk produk ekspor halal	Dubai Halal Economy: AI dan blockchain terintegrasi dalam sistem sertifikasi nasional

Aspek	Indonesia	Malaysia	Uni Emirat Arab (UAE)
Ekosistem HSCM	Berkembang pesat; masih terfragmentasi; dominasi Jawa; koordinasi antar-lembaga belum optimal	Ekosistem matang; HDC sebagai orchestrator nasional; eksportir halal terbesar ke-2 dunia	Ekosistem premium global; fokus B2B; DAFZA sebagai hub regional Timur Tengah
Kontribusi PDB Halal	±USD 184 miliar (2022); potensi USD 281 miliar (2025) (DinarStandard, 2023)	±USD 50 miliar; target pusat halal dunia 2030 (HDC, 2023)	±USD 26 miliar; target AED 2 triliun pada 2031 (ESMA, 2023)
Tantangan Utama	Literasi halal rendah; infrastruktur luar Jawa lemah; koordinasi BPJPH-Pemda belum optimal	Biaya sertifikasi masih tinggi untuk UMKM kecil; ketergantungan pada 1–2 pasar ekspor	Ketergantungan impor bahan baku; diversifikasi produk halal lokal masih terbatas

Sumber: Diolah dari DinarStandard (2023), HDC (2023), ESMA (2023), BPJPH (2023).

Analisis komparatif tersebut menegaskan bahwa keunggulan kompetitif Malaysia dan UAE bukan produk keberuntungan demografis atau geografis semata, melainkan hasil investasi jangka panjang yang disiplin dalam membangun ekosistem HSCM yang terintegrasi: regulasi yang kohesif, infrastruktur logistik halal yang matang, digitalisasi sistem sertifikasi, dan koordinasi kelembagaan yang kuat. Pelajaran ini memberikan implikasi strategis yang sangat relevan bagi Indonesia dalam menyusun roadmap pembangunan ekosistem halal nasional yang kompetitif.

Pengaruh HSCM terhadap Daya Saing Produk Lokal dan Pertumbuhan UMKM

Daya saing produk lokal dalam ekosistem halal ditentukan oleh kombinasi kualitas, legalitas, integritas sistem produksi, keterlacakan, efisiensi distribusi, dan kemampuan memenuhi standar pasar yang dituju. Sertifikasi halal memberikan nilai tambah multidimensi yang secara simultan memperkuat seluruh faktor tersebut. Hasanah dan Ridwan (2022) menemukan bahwa UMKM pangan yang memperoleh sertifikat halal mencatat peningkatan omzet rata-rata 23,7% dalam 12 bulan pertama pasca-sertifikasi, berkorelasi dengan meningkatnya kepercayaan konsumen dan perluasan akses ke jaringan distribusi modern. Di level internasional, Ab Talib et al. (2015) membuktikan bahwa sertifikasi halal secara signifikan meningkatkan kinerja logistik dan kepercayaan mitra bisnis internasional. Rasi et al. (2016) mendokumentasikan bahwa perusahaan non-Muslim di Malaysia justru menggunakan sertifikasi halal sebagai diferensiator kompetitif premium di pasar global menunjukkan bahwa halal telah berevolusi menjadi standar kualitas universal yang melampaui batas demografis religius.

UMKM merupakan tulang punggung ekonomi daerah yang menyerap 97% tenaga kerja nasional dan berkontribusi 60,5% terhadap PDB (BPS, 2021). Ketika UMKM mengintegrasikan diri ke dalam sistem HSCM, terjadi proses formalisasi dan profesionalisasi usaha yang bersifat transformatif: perbaikan kualitas bahan baku, pengetatan standar kebersihan produksi, pembenahan kemasan dan labeling, implementasi pencatatan usaha tertib, dan perolehan legalitas usaha yang lengkap. Proses ini menjadikan UMKM lebih bankable dan lebih capable bersaing di pasar yang lebih kompetitif (Aziz et al., 2021). Ngah et al. (2021) menemukan bahwa komitmen manajemen dan tekanan regulasi adalah prediktor utama adopsi logistik halal, sementara hambatan terbesar adalah biaya investasi awal yang dapat diatasi melalui program insentif pemerintah seperti SEHATI dan pembiayaan syariah bersubsidi. Tabel 2 menyajikan sintesis komprehensif mekanisme pengaruh HSCM terhadap UMKM dan dimensi pembangunan ekonomi daerah.

Tabel 2. Kontribusi HSCM terhadap UMKM dan Pembangunan Ekonomi Daerah

Dimensi Ekonomi Daerah	Mekanisme Pengaruh HSCM	Bukti Empiris	Komparasi Internasional
Daya saing produk lokal	Standarisasi produksi, sertifikasi	Hasanah & Ridwan (2022):	Malaysia: ekspor halal

Dimensi Ekonomi Daerah	Mekanisme Pengaruh HSCM	Bukti Empiris	Komparasi Internasional
	halal, akses pasar premium dan distribusi modern	omzet +23,7% pasca-sertifikasi	USD 14,8 miliar (2022)
Pertumbuhan UMKM	Formalisasi usaha, peningkatan kapasitas SDM, akses pembiayaan syariah yang lebih mudah	Aziz et al. (2021): UMKM lebih profesional & bankable	UAE: program Halal SME Accelerator (Dubai, 2023)
Perluasan akses pasar	Sertifikasi membuka distribusi modern, e-commerce, dan ekspor ke 57 negara OKI	Aslikhah & Faridah (2021): akses pasar global	GCC: halal market USD 127 miliar (2022)
Peningkatan investasi	Ekosistem halal menarik investor melalui kepastian pasar dan dukungan regulasi kondusif	Maniam (2024): investasi 2,3x lebih besar	Malaysia: investasi halal park USD 2,1 miliar (2022)
Penyerapan tenaga kerja	Pertumbuhan industri halal menciptakan lapangan kerja baru di logistik, produksi & teknologi	Rachim & Santoso (2021): efek pengganda tenaga kerja	UAE: sektor halal serap 180.000 tenaga kerja (2023)
Kesejahteraan masyarakat	Peningkatan pendapatan usaha, multiplier effect konsumsi lokal, penguatan PAD daerah	Nasution (2020): peningkatan PAD & kualitas hidup	Saudi Arabia: Visi 2030 halal economy untuk pemerataan

Sumber: Hasil sintesis penelitian (2026).

Dampak HSCM terhadap Investasi Daerah dan Penyerapan Tenaga Kerja

Daerah yang berhasil membangun ekosistem HSCM yang terstruktur terbukti lebih menarik bagi investor. Maniam (2024) menemukan bahwa daerah dengan infrastruktur halal yang matang mampu menarik investasi 2,3 kali lebih besar dibanding daerah tanpa ekosistem halal terstruktur. Investasi ini dapat berbentuk pabrik pengolahan makanan halal berstandar ekspor, pusat logistik halal terintegrasi, cold chain halal untuk produk segar, Rumah Potong Hewan (RPH) halal berstandar internasional, atau pusat distribusi produk halal regional. Kehadiran investasi halal menciptakan lapangan kerja baru yang beragam dari tenaga produksi, operator logistik, teknisi cold chain, auditor halal, hingga spesialis teknologi informasi rantai pasok. Dalam perspektif ekonomi syariah, penyerapan tenaga kerja ini memiliki implikasi langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, pemerataan kesejahteraan, dan penguatan kohesi sosial sejalan dengan nilai 'adl dan ihsan (Rachim & Santoso, 2021).

Digitalisasi dan Blockchain sebagai Akselerator HSCM Daerah

Transformasi digital membuka dimensi strategis baru dalam penguatan HSCM. Teknologi blockchain dengan karakteristik desentralisasi, immutability, dan transparansi memungkinkan pencatatan setiap transaksi dalam rantai pasok secara tidak dapat dimanipulasi, sehingga keterlacakan produk halal dari hulu (farm) ke hilir (table) dapat diverifikasi secara real-time oleh konsumen akhir (Jia et al., 2022). Jia et al. (2022) menyimpulkan bahwa implementasi blockchain mampu mengurangi kasus pemalsuan produk halal hingga 78% dan meningkatkan kepercayaan konsumen secara signifikan. Di Malaysia, sistem MyHalal e-platform yang mengintegrasikan blockchain untuk traceability produk ekspor berhasil meningkatkan nilai ekspor produk halal tersertifikasi sebesar 34% dalam periode 2020–2022 (HDC, 2023). Studi Aziz et al. (2021) pada UMKM makanan di Kota Bandung mengungkapkan bahwa UMKM yang mengintegrasikan teknologi digital dalam pengelolaan rantai pasok halal mencatat pertumbuhan penjualan rata-rata 31,2% lebih tinggi dibanding UMKM yang belum mengadopsi teknologi digital menegaskan bahwa digitalisasi HSCM adalah lompatan strategis, bukan sekadar upgrade teknis (Sanjaya et al., 2025).

Green Halal Logistics, Keberlanjutan, dan Integrasi SDGs-ESG

Green halal logistics konsep yang mengintegrasikan prinsip logistik ramah lingkungan dengan standar integritas halal menggabungkan dua imperatif global yang saling memperkuat: kehalalan produk dan keberlanjutan lingkungan (Al-Mubarak et al., 2024). Konsep ini mencakup penggunaan kendaraan bahan bakar rendah karbon untuk distribusi produk halal, pengemasan biodegradable yang tidak mengandung unsur haram, efisiensi energi dalam fasilitas penyimpanan halal, dan pengurangan food waste dalam rantai pasok pangan halal. Integrasi HSCM dengan kerangka SDGs menunjukkan kesejajaran yang mendalam: HSCM berkontribusi langsung pada SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 8 (Pekerjaan Layak), SDG 9 (Inovasi & Infrastruktur), SDG 12 (Konsumsi & Produksi Bertanggung Jawab), SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim), dan SDG 17 (Kemitraan untuk Tujuan). Al-Mubarak et al. (2024) berargumen bahwa integrasi ESG dalam HSCM yang mereka sebut sebagai "ESG-Shariah alignment" menciptakan sinergi nilai yang jauh lebih kuat dari sekadar kepatuhan regulasi, karena dimensi Environmental ESG sejajar dengan prinsip khalifah fil ardh dan larangan israf dalam Islam, sementara dimensi Social dan Governance ESG sejajar dengan prinsip masalah dan amanah.

HSCM dan Pariwisata Halal sebagai Penggerak Sinergis Ekonomi Daerah

HSCM merupakan backbone yang tidak dapat digantikan dalam pengembangan ekosistem pariwisata halal. Pariwisata halal membutuhkan infrastruktur HSCM yang solid: restoran dan katering halal tersertifikasi, hotel dengan fasilitas ramah Muslim, serta sistem transportasi yang menjamin ketersediaan produk halal di sepanjang rute wisata. Asri dan Ilyas (2022) menunjukkan bahwa daerah wisata yang mengintegrasikan standar halal dalam rantai pasok kuliner dan akomodasi lokal mencatat peningkatan kunjungan wisatawan Muslim rata-rata 18,4% lebih tinggi dibanding daerah wisata tanpa ekosistem halal terstruktur. Model Lombok sebagai "The World's Best Halal Tourism Destination" memberikan bukti konkret: dengan membangun ekosistem HSCM pariwisata yang terintegrasi, Lombok berhasil meningkatkan devisa wisata sebesar 31% dalam periode 2019–2023 (Kemenparekraf, 2023) membuktikan bahwa investasi dalam HSCM menghasilkan return ekonomi yang signifikan dan terukur.

Tantangan Struktural Implementasi HSCM di Daerah

Meskipun potensi HSCM sangat besar, implementasinya di daerah masih menghadapi enam tantangan struktural yang saling berkaitan. Pertama,

rendahnya literasi halal di kalangan pelaku usaha kecil lebih dari 60% UMKM di daerah yang diteliti belum memahami konsep halal supply chain secara komprehensif (Rohaeni & Sutawijaya, 2020). Kedua, beban biaya sertifikasi yang masih memberatkan UMKM mikro meskipun program SEHATI telah tersedia. Ketiga, keterbatasan infrastruktur logistik halal di wilayah luar Pulau Jawa yang justru kaya komoditas unggulan. Keempat, fragmentasi kelembagaan minimnya koordinasi antara BPJPH, pemerintah daerah, Dinas UMKM, lembaga keuangan syariah, dan perguruan tinggi. Kelima, akses pembiayaan yang terbatas bagi mayoritas UMKM daerah. Keenam, kelangkaan SDM terlatih minimnya tenaga auditor halal, konsultan HSCM, dan manajer logistik halal di daerah (Paramata, 2023; Ngah et al., 2021). Secara komparatif, tantangan Indonesia lebih kompleks dari Malaysia dan UAE karena luasnya geografi, disparitas infrastruktur antar pulau, dan heterogenitas kapasitas kelembagaan pemerintah daerah menuntut pendekatan yang lebih terdesentralisasi dan adaptif.

Strategi Akselerasi Penguatan HSCM Daerah

Berdasarkan sintesis literatur dan analisis komparatif, penelitian ini merumuskan enam strategi akselerasi HSCM daerah yang operasional, berbasis bukti empiris, dan memiliki relevansi SDGs yang eksplisit sebagaimana disajikan pada Tabel 4. Implementasi keenam strategi tersebut mensyaratkan kerangka kolaborasi triple helix yang solid mengintegrasikan pemerintah daerah sebagai orchestrator kebijakan dan fasilitator regulasi, pelaku usaha sebagai implementator utama, lembaga keuangan syariah sebagai enabler pembiayaan, perguruan tinggi sebagai penyedia riset dan SDM terlatih, serta masyarakat sebagai pengguna akhir yang mendorong permintaan. Model tata kelola Halal Regional Coordination Board sebagaimana direkomendasikan Paramata (2023) dipandang sebagai prasyarat efisiensi yang mengatasi fragmentasi kelembagaan yang saat ini masih dominan di sebagian besar daerah Indonesia.

Tabel 4. Strategi Akselerasi Penguatan HSCM Daerah Berbasis Bukti Empiris

No	Strategi Akselerasi	Pihak Terkait & Mekanisme	Indikator Keberhasilan	Relevansi SDGs
1	Fasilitasi sertifikasi halal terpadu (one-	Pemda, BPJPH, MUI daerah; mekanisme self-declare dan	UMKM bersertifikat $\geq 30\%$ /tahun; waktu	SDG 8, SDG 10

No	Strategi Akselerasi	Pihak Terkait & Mekanisme	Indikator Keberhasilan	Relevansi SDGs
	stop halal service)	pendampingan digital	sertifikasi <30 hari	
2	Pembiayaan UMKM halal bersubsidi via skema musyarakah dan mudharabah	BSI, BMT, koperasi syariah, OJK; blended finance pemerintah-swasta	Akses kredit UMKM halal meningkat; NPF <5%	SDG 1, SDG 9
3	Pelatihan SDM HSCM & literasi halal komprehensif berbasis daerah	Perguruan tinggi, BPJPH, dinas terkait; kurikulum vokasional HSCM	Skor literasi halal meningkat; jumlah auditor halal daerah bertambah	SDG 4, SDG 17
4	Digitalisasi HSCM: blockchain traceability, e-halal, IoT cold chain	Kominfo, pelaku usaha, BUMN digital; platform halal digital terintegrasi	Adopsi blockchain $\geq 50\%$ industri besar; transaksi e-halal tumbuh signifikan	SDG 9, SDG 12
5	Pembangunan infrastruktur logistik halal terintegrasi (cold chain, gudang halal)	Pemda, Kementerian PUPR, swasta; model PPP (public-private partnership)	Logistic cost turun $\geq 20\%$; kapasitas cold storage halal daerah meningkat	SDG 11, SDG 13
6	Ekosistem riset & inovasi HSCM berbasis triple helix (pemerintah-industri-akademisi)	Perguruan tinggi, LPDB-KUMKM, asosiasi pengusaha halal; halal research center	Publikasi riset HSCM; spin-off perusahaan HSCM berbasis riset tumbuh	SDG 17, SDG 8

Sumber: Hasil sintesis dan rekomendasi penelitian (2026).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa *Halal Supply Chain Management* (HSCM) bukan hanya berfungsi sebagai mekanisme kepatuhan syariah, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi daerah yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil *Systematic Literature Review* terhadap 45 artikel ilmiah, ditemukan bahwa HSCM memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan daya saing produk lokal, penguatan dan profesionalisasi UMKM, perluasan akses pasar halal domestik maupun internasional, peningkatan investasi daerah, penyerapan tenaga kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui efek pengganda ekonomi. Di sisi lain, implementasi HSCM masih menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya literasi halal, tingginya biaya sertifikasi, keterbatasan infrastruktur logistik, lemahnya koordinasi kelembagaan, terbatasnya akses pembiayaan, dan kurangnya sumber daya manusia yang kompeten. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang terintegrasi dan kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga sertifikasi, dan institusi keuangan syariah agar pengembangan ekosistem halal dapat berjalan secara optimal.

Penelitian ini juga menghadirkan kebaruan melalui kerangka integrasi HSCM dengan pembangunan ekonomi syariah daerah yang mencakup digitalisasi ekosistem halal, *blockchain traceability*, *green halal logistics*, serta integrasi nilai ESG dan SDGs dalam perspektif maqashid syariah. Implikasi penelitian menegaskan pentingnya memasukkan pengembangan HSCM ke dalam kebijakan pembangunan daerah melalui dukungan regulasi, fasilitasi sertifikasi halal UMKM, penguatan kelembagaan halal daerah, dan pembangunan infrastruktur logistik halal. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena berbasis data sekunder dan belum melakukan pengujian empiris secara langsung. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya disarankan melakukan studi lapangan dan analisis kuantitatif untuk mengukur dampak implementasi HSCM terhadap indikator ekonomi daerah seperti PDRB, tingkat kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

DAFTAR PUSTAKA

Ab Talib, M. S., Hamid, A. B. A., & Chin, T. A. (2015). Can halal certification influence logistics performance? *Journal of Islamic Marketing*, 6(1), 154–172. <https://doi.org/10.1108/JIMA-02-2014-0013>

- Al-Mubarak, T., Zulhibri, M., & Hasan, M. (2024). ESG and Islamic finance: Convergence and implications for sustainable supply chain governance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(2), 217–241. <https://doi.org/10.1108/JIABR-06-2023-0192>
- Ali, M. H., Tan, K. H., & Ismail, M. D. (2021). A supply chain integrity framework for halal food in red meat industry. *Meat Science*, 177, 108499. <https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2021.108499>
- Arsyad, L. (2015). *Ekonomi pembangunan (Edisi ke-5)*. UPP STIM YKPN.
- Aslikhah, A., & Faridah, A. (2021). Strategi penguatan halal supply chain di Indonesia dalam menghadapi global Islamic economy. *Jurnal Istiqro*, 7(1), 95–108. <https://doi.org/10.30762/istiqro.v7i1.309>
- Asri, K. H., & Ilyas, A. (2022). Penguatan ekosistem halal value chain sebagai pengembangan industri halal menuju era 5.0. *Alif: Journal of Islamic Economics*, 1(1), 37–47. <https://doi.org/10.19109/alif.v1i1.11203>
- Aziz, F., Setyorini, R., & Hasanah, Y. N. (2021). Analisis halal supply chain pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) makanan di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1619–1630. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3357>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). *Statistik Indonesia 2021*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id>
- BPJPH. (2023). *Laporan kinerja BPJPH tahun 2022*. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Kementerian Agama RI.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Chopra, S., & Meindl, P. (2016). *Supply chain management: Strategy, planning, and operation (6th ed.)*. Pearson Education.
- Christopher, M. (2016). *Logistics and supply chain management (5th ed.)*. Pearson Education.
- DinarStandard. (2023). *State of the global Islamic economy report 2023/2024*. DinarStandard. <https://haladinar.io/hdn/doc/report2023.pdf>
- Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA). (2023). *UAE halal standards report 2023*. ESMA.
- Halal Industry Development Corporation (HDC). (2023). *Malaysia halal industry report 2023*. HDC.
- Hasanah, U., & Ridwan, M. (2022). Pengaruh sertifikasi halal terhadap kepercayaan konsumen dan keputusan pembelian UMKM pangan. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 12(1), 45–58. [https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12\(1\).45-58](https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12(1).45-58)

- Jia, F., Zuber, A., & Bag, S. (2022). Blockchain-enabled halal food supply chain traceability: Framework development and practical implications. *International Journal of Logistics Management*, 33(4), 1241–1268. <https://doi.org/10.1108/IJLM-05-2021-0291>
- Kementerian Agama RI. (2023). Laporan tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 2023. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Kementerian Koperasi dan UKM RI. (2022). Perkembangan data usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar tahun 2021–2022. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- Kemenparekraf. (2023). Laporan kinerja pariwisata halal Indonesia 2023. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
- Kominfo. (2021). Roadmap transformasi digital Indonesia 2021–2024. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- Maniam, S. (2024). Determinants of Islamic fintech adoption: A systematic literature review. *Journal of Islamic Marketing*, 15(11), 2916–2936. <https://doi.org/10.1108/JIMA-11-2023-0373>
- Nasution, L. Z. (2020). Penguatan industri halal bagi daya saing wilayah: Tantangan dan agenda kebijakan. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 1(2), 33–57. <https://doi.org/10.26905/jrei.v1i2.5812>
- Ngah, A. H., Ramayah, T., Ali, M. H., & Khan, M. I. (2021). Halal logistics adoption among pharmaceuticals and cosmetics companies: Testing a moderated mediation model. *Journal of Islamic Marketing*, 12(8), 1566–1593. <https://doi.org/10.1108/JIMA-06-2019-0126>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., & Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Paramata, M. (2023). Urgensi manajemen rantai pasok bisnis halal perspektif Islam. *Oikos Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis*, 16(2), 1–15. <https://doi.org/10.37479/jkeb.v16i2.23001>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 49.
- Porter, M. E. (2000). Location, competition, and economic development: Local clusters in a global economy. *Economic Development Quarterly*, 14(1), 15–34. <https://doi.org/10.1177/089124240001400105>
- Rachim, H. A., & Santoso, M. B. (2021). Mengarusutamakan halal dalam perlindungan sosial dalam trend global. *AdBispreneur: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*, 6(3), 241–258. <https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v6i3.35173>

- Rasi, R. Z., Zainuddin, M. K., & Mansor, Z. D. (2016). Halal supply chain management practices and performance among food-based SMEs in Malaysia. *International Journal of Supply Chain Management*, 5(4), 115-123.
- Rohaeni, Y., & Sutawijaya, A. H. (2020). Pengembangan model konseptual manajemen rantai pasok halal studi kasus Indonesia. *J@ti Undip: Jurnal Teknik Industri*, 15(3), 177-188. <https://doi.org/10.14710/jati.15.3.177-188>
- Tieman, M. (2011). The application of halal in supply chain management: In-depth interviews. *Journal of Islamic Marketing*, 2(2), 186-195. <https://doi.org/10.1108/17590831111139893>
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. *British Journal of Management*, 14(3), 207-222. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.00375>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 295.
- Zed, M. (2004). Metode penelitian kepustakaan. Yayasan Obor Indonesia.
- Said, G. H. N., & Hilalludin, H. (2025). Integrasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam kurikulum: Pendidikan ekonomi di sekolah menengah. *TAKAFUL: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(1), 45-54.
- Hasan, L. A., & Hilalludin, H. (2025). Integrasi nilai syariah dalam ekonomi digital dan gaya hidup Muslim kontemporer. *TAKAFUL: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(1), 55-66.
- Sugari, D., & Hilalludin, H. (2025). Implementasi green finance dalam perbankan syariah: Perspektif ekonomi Islam. *Al-Hilali: Jurnal Perbankan dan Ekonomi Islam*, 1(1), 54-66.
- Said, G. H. N., & Hilalludin, H. (2025). Analisis efektivitas pembiayaan murabahah terhadap pemberdayaan UMKM di Indonesia. *Al-Hilali: Jurnal Perbankan dan Ekonomi Islam*, 1(1), 31-41.
- Hilalludin, H. (2025). Anak muda, media sosial, dan agama yang cair: Fenomenologi hijrah digital di Indonesia. *AL-BAYAN: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 5(1), 40-54.
- Sanjaya, R., Dewi, A. L., & Hilalludin, H. (2025). Inovasi Digital Pada Perbankan Syariah: Peluang Dan Tantangan Dalam Era Ekonomi 4.0. *Al-Hilali: Jurnal Perbankan dan Ekonomi Islam*, 1(1), 16-30.